

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan yang paling krusial dalam mengatur perekonomian suatu negara. Didasari oleh fungsi utama untuk mengatur kestabilan peredaran mata uang dalam satu negara, kebijakan ini mempunyai tujuan untuk mempengaruhi perekonomian melalui perubahan-perubahan yang dapat terlihat secara nyata dalam sektor riil, seperti contohnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan per kapita, stabilitas harga, serta meratanya pembangunan dan neraca pembayaran (Nangarumba, 2016). Hilirnya diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada negara dan pihak pemerintah di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya (Hardini, 2017). Semua target ini dapat terealisasi melalui adanya berbagai transmisi kebijakan moneter yang menunjukkan efek-efek yang terjadi dalam sektor riil perekonomian melalui terjaminnya kestabilan peredaran mata uang dalam negara (Herlina, 2018; Warjiyo, 2004). Pelaksanaan kebijakan ini harus efektif dan efisien supaya dalam prosesnya menjadi salah satu aspek yang dikedepankan untuk melindungi perekonomian negara, terutama dalam keadaan rentan seperti ketika terjadinya krisis atau guncangan ekonomi secara global (Saiki & Frost, 2020).

Sungguh pun demikian, dibalik terciptanya situasi ekonomi yang prima tersebut pun, tidak menjamin akan terhindarnya negara tersebut dari masalah ekonomi lainnya. Bahkan, masalah yang dialami pun cukup dekat. Apabila keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang telah terukur, justru seringkali tidak diikuti oleh keberhasilan dari sisi pemerataan distribusi pendapatan, akan berisiko mendatangkan masalah perekonomian yang kerap ditemui di berbagai negara, salah satu di antaranya yang cukup signifikan adalah kesenjangan pendapatan (Kurniadi & Pasaribu, 2017). Hal ini merupakan fenomena ekonomi yang dapat ditemui secara global, pada banyak negara dengan berbagai status, baik berkembang maupun maju, berbagai kondisi ekonomi, serta berbagai macam kebijakan moneter yang diterapkan.

Terdapat berbagai macam spekulasi dari mana kesenjangan pendapatan bisa muncul. Teori dari *United Nations* pada tahun 2013 menyatakan kesenjangan pendapatan terbagi atas dua penyebab, yaitu faktor eksogen dan faktor endogen. Faktor eksogen meliputi peristiwa seperti perkembangan teknologi dan *awareness* masyarakat terhadap hal tersebut, melalui adanya sistem pembiayaan tenaga kerja berdasarkan kapabilitas dalam mengerjakan berbagai bidang dan mengikuti kemajuan zaman (UNDP, 2013). Penelitian sebelumnya membuktikan dengan sangat jelas, adanya kesenjangan pendapatan antar golongan tenaga kerja yang berbeda (Acemoglu, 2002; Dao, 2008). Sementara itu, faktor endogen didorong dari peraturan dan kebijakan dalam negara yang dapat mempengaruhi perekonomian domestik secara menyeluruh, yang pastinya mempunyai ranah makroekonomi seperti kebijakan fiskal atau moneter. Hal inilah yang menjadi fokus pembahasan penelitian, sekaligus dasar hipotesis bahwa kebijakan moneter mempunyai andil dalam mempengaruhi distribusi pendapatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebijakan moneter dapat mempengaruhi berbagai lapisan perekonomian masyarakat melalui saluran transmisi kebijakan yang efeknya memberikan redistribusi bagi masyarakat dengan salah satu hasil yang diharapkan adalah meratanya pendapatan, meskipun perlu ditandai bahwa redistribusi pun dapat memberikan hasil yang sebaliknya (Areosa & Areosa, 2016; Casiraghi & Gaiotti, 2016; Coibion *et al.*, 2017; Furceri *et al.*, 2018; Guerello, 2018).

Meninjau dari sebagian besar kasus di berbagai negara, peran bank sentral terbatas pada penjagaan stabilitas harga, sehingga seharusnya tidak mengintervensi urusan distribusi pendapatan dan kekayaan. Poinnya, hal yang ingin dicapai bank sentral adalah keseimbangan internal, dan begitu pulalah yang diimplementasikan dalam kebijakan moneter yang mereka susun. Namun, perspektif publik mengenai dampak kebijakan moneter terhadap kesenjangan pendapatan dan kekayaan mulai terbuka dewasa ini. Hal tersebut terdorong oleh munculnya berbagai peristiwa ekonomi yang mendorong pembuatan berbagai kebijakan penanggulangan (Areosa & Areosa, 2016; Ghossoub & Reed, 2017).

Salah satu contoh peristiwa terkait isu ini, misalnya negara Jepang, yang bertindak dengan menerapkan kebijakan moneter spesifik untuk mengobati pertumbuhan ekonomi yang lambat dan inflasi yang rendah pasca krisis ekonomi dunia tahun 2008 dengan menggunakan kebijakan moneter nonkonvensional. Lebih lanjutnya, metode bernama *Quantitative & Qualitative Easing* (QQE) ini, menekankan peran bank sentral dalam pembelian sekuritas jangka panjang di pasar terbuka guna meningkatkan pasokan uang, sekaligus dalam prosesnya turut menjual aset yang bernilai lebih tinggi seperti emas dan valuta asing. Selain itu, operasi pasar juga dijalankan untuk mengontrol suku bunga jangka pendek dan panjang. Kebijakan yang cenderung ekspansif ini diindikasikan justru mendorong orang yang ada di golongan usia tua, atau pensiunan, menjadi semakin kaya karena kebanyakan dari mereka menimbun kekayaan melalui investasi produk finansial. Sementara itu, kelas pekerja tidak memperoleh kenaikan upah signifikan secara keseluruhan, dan hanya beberapa sektor tertentu yang mendapat sejumlah kenaikan. Kebijakannya bahkan tidak meningkatkan inflasi (Feldkircher & Kakamu, 2021; Inui *et al.*, 2020; Saiki & Frost, 2014, 2020).

Kendati banyaknya variasi penelitian sebelumnya tersebut, pembuktian dari pengaruh kebijakan moneter terhadap kesenjangan pendapatan secara keseluruhan masih cenderung kontroversial dikarenakan adanya berbagai jenis hasil, dan sebagian tidak bersifat konklusif (Siarni-Namini *et al.*, 2020). Banyaknya saluran transmisi membuat pengaruh dari kebijakan moneter, bagaimanapun bentuknya, terhadap kesenjangan pendapatan, menjadi sulit untuk dipastikan (Furceri *et al.*, 2018). Namun, terdapat beberapa penelitian yang menemukan pengaruh saluran ini. Misalnya saluran mekanisme kebijakan moneter terhadap kesenjangan pendapatan melalui adanya *unskilled labor* yang tidak memiliki akses pada sistem keuangan, di mana *shock* dari kebijakan moneter yang bersifat kontraksioner seperti peningkatan suku bunga ditemukan dapat mengurangi inflasi dan *output gap*, tetapi di sisi lain juga mempengaruhi semakin tingginya kesenjangan pendapatan. Contoh lainnya misalnya komposisi pendapatan (*income composition*). Teori ini menyatakan pendapatan sebagian besar *household*/rumah tangga hanya bergantung pada upah dari hasil bekerja, sementara rumah tangga lainnya mampu mendapatkan

pendapatan ekstra dari kepemilikan aset finansial. Kebijakan yang bersifat ekspansif justru lebih menguntungkan rumah tangga yang memiliki aset finansial (sejauh mereka mempunyai lebih banyak harta), sehingga pengaruhnya justru akan meningkatkan kesenjangan pendapatan (Casiraghi & Gaiotti, 2016; Coibion *et al.*, 2017; Furceri *et al.*, 2018).

Meskipun jawaban kebijakan moneter seperti apa yang justru meningkatkan kesenjangan pendapatan atau sebaliknya masih mengambang, sebagian besar penelitian telah menunjukkan bahwa sistem kebijakan yang ekspansif lebih tepat guna untuk menanggulangi kesenjangan pendapatan dan juga meningkatkan taraf ekonomi suatu negara, terutama di negara berkembang/*periphery* (Cojocaru *et al.*, 2017; Furceri *et al.*, 2018; Putri & Wasiaturrahma, 2019; Romer & Romer, 1998; Samarina & Nguyen, 2019; Siami-Namini *et al.*, 2020). Sementara itu, sebagian kecil menyebutkan kebijakan moneter yang ekspansif adalah penyebabnya (Duarte & Schnabl, 2019; Siami-Namini *et al.*, 2020), dan ada juga pendapat bahwa efek kebijakan moneter masih abu-abu atau cenderung irrelevant (Ghossoub & Reed, 2017; Guerello, 2018; Lenza & Slacalek, 2018).

Sebelumnya telah dilakukan beberapa observasi mengenai hubungan kebijakan moneter terhadap kesenjangan pendapatan baik dalam lingkup negara secara individu, atau secara kolektif, seperti pada tingkat benua (Albanesi, 2007; Furceri *et al.*, 2018; O'Farrell & Rawdanowicz, 2017; Perugini *et al.*, 2015; Samarina & Nguyen, 2019). Namun, penelitian secara spesifik di area Asia (terutama di luar Asia Timur) cukup jarang ditemui, meskipun masih banyak negara mempunyai kondisi yang memenuhi kebutuhan isu untuk penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan lima sampel negara sebagai subjek, yang terdiri atas lima negara besar pendiri ASEAN, atau yang biasa disebut dengan ASEAN-5, terdiri atas Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Latar belakang yang mendasari pemilihan sampel tersebut, dikarenakan kelima negara pemrakarsa ASEAN ini mempunyai perjalanan pembangunan ekonomi yang cukup signifikan selama tiga dekade

terakhir (lebih tepatnya pada akhir abad ke-20) dan dalam prosesnya mampu menghasilkan nilai ekspor dan impor yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (Sulaeman & Lisna, 2016).

Pernyataan tersebut dibuktikan melalui kesuksesan Singapura menyusul teritori Asia Timur seperti Hongkong, Taiwan, dan negara Korea Selatan dalam memaksimalkan kinerja ekonomi negara dan menghasilkan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun yang tinggi hingga membuat keempatnya dijuluki Empat Harimau Asia, sebuah kelompok kolektif yang mendorong laju perekonomian internasional dan menjadi perwakilan negara maju dari Kawasan Asia (Hamilton, 1983). Kesuksesan mereka mendorong banyak negara berkembang di seluruh dunia untuk mencontoh jejak mereka, di antaranya empat anggota lain dari ASEAN-5, yang mencatatkan histori pertumbuhan ekonomi signifikan sehingga dianggap menjadi calon potensial anggota negara maju dalam beberapa tahun ke depan, dalam kelompok yang dinamakan anak-anak harimau (Lin & Liang, 2019). Asia Tenggara mulai bertumbuh menjadi salah satu area perputaran finansial Asia yang terkuat dan diprediksi akan semakin naik dalam tingkatan kualitas perekonomian dunia, terutama melalui hubungan antar teritori kawasan China yang disebut dengan *bamboo network* (Cheung & Gomez, 2012). Proses industrialisasi dan pertumbuhan manufaktur negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand, hampir menyamai jumlah yang dicapai Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan selama dua dekade, sehingga berpotensi mendatangkan *Foreign Direct Investment* yang ekstensif (Williamson & Bassino, 2015).

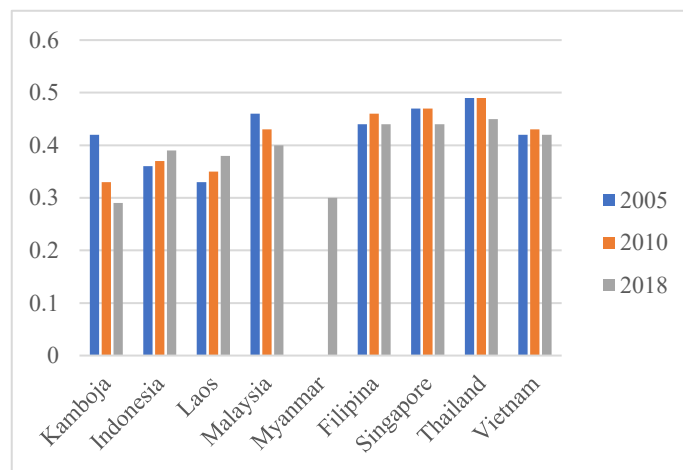
Meskipun begitu, kondisi Asia Tenggara, atau lebih spesifiknya ASEAN-5 pada saat itu juga belum menunjukkan kondisi finansial yang stabil dan distribusi yang baik, dan hal ini diperburuk ketika Thailand menjadi lokasi awal dimulainya Krisis Moneter 1997-1998, sebuah kejadian yang cukup mempengaruhi kondisi finansial berbagai negara di Asia Tenggara secara luas dan sebagian Asia Timur. Krisis ini dimulai akibat melemahnya nilai tukar baht Thailand terhadap Dollar Amerika Serikat, dan pada akhirnya merambat ke berbagai negara lain di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Negara Thailand menyalahkan bank sentral karena kurangnya pengaruh mereka terhadap institusi

keuangan yang selain bermasalah di berbagai sisi, juga mendorong penumpukan *hot money*, serta tidak efektifnya pengawasan mereka sekaligus sistem nilai tukar *fixed* yang mereka terapkan (Durham, 2007; Jansen, 2001; Punyaratabandhu, 1999). Penurunan ekonomi ASEAN-5 cukup fatal, Indonesia mencatat persentase yang terendah yaitu sebesar -13,1%, sementara Thailand sebagai pasien nol mencatat -10,5%, disusul dengan Malaysia -7,4%, Singapura -2,2%, dan Filipina -0,6% (Sulaeman & Lisna, 2016).

Pascakrisis, kelima negara tersebut perlahan mencoba bangkit dari keterpurukan krisis tahun demi tahun hingga kembali merasakan kestabilan ekonomi. Namun, terlihat bahwa memulihnya perekonomian pun tidak menjamin *benefitnya* akan dirasakan semua pihak. Apabila dilihat dari sisi kesenjangan, fenomena tersebut masih terjadi dengan jelas. Hal ini dibuktikan melalui indikator substansial kesenjangan pendapatan, yaitu rasio gini. Kestabilan atau pertumbuhan ekonomi yang tidak merata merupakan hal yang masih kerap ditemui di benua Asia. Hal ini tidak terkecuali kepada negara dalam ASEAN-5, yang dihitung sejak sebelum terjadinya krisis 1997-98, dan sesudah krisis tersebut berlalu, rasio gininya masih cukup tinggi (Azam & Raza, 2018).

Meskipun keterbatasan data rasio gini di masa lalu, berdasarkan sampel tahun 1995 (masa pra-krisis), dapat ditemukan bahwa kesenjangan pendapatan itu sendiri di ASEAN-5 tergolong sudah tinggi. Secara rata-rata kelima negara tersebut mencatatkan angka 0.44 dengan hanya Indonesia yang rasio gininya masih berada pada angka 0.3, sehingga Indonesia menjadi *outlier* dari sejumlah negara tetangga yang kesenjanganannya cukup tinggi. Jumlah terbesar berasal dari Singapura yang kesenjanganannya mencapai angka 0.5-0.52 menandakan kesenjangan yang tinggi (Ridzuan *et al.*, 2019), sementara posisi kedua diisi Malaysia, dengan statistik resmi dari Malaysia mencatat kesenjangan sebesar 46%. Data dari ASEAN (ASEAN, 2019) menunjukkan tingginya rasio gini dari ASEAN-5 selaku unit kolektif pemrakarsa ASEAN dengan kekuatan finansial paling memadai di Asia tenggara. Persentase dari negara tersebut cenderung lebih besar dibandingkan negara-negara lainnya yang mempunyai jumlah penduduk lebih kecil. Hanya Vietnam negara diluar ASEAN-5 yang mempunyai persentase rasio gini yang kurang lebih setara,

walaupun ini bisa juga dikarenakan jumlah penduduknya yang tinggi. Berdasarkan data rasio gini menurut laporan resmi ASEAN, meskipun mengalami keterbatasan data sehingga tidak semuanya menunjukkan angka di tahun paling terkini, yaitu 2018, terlihat bahwa apabila data tahun terkini tiap negara dirata-rata, kurang lebih pada kurun waktu 2015-2018 ASEAN-5 mencatatkan rasio gini sebesar 0.43 atau 43% (tidak termasuk Brunei Darussalam).



Gambar 1.1

Grafik rasio gini di negara-negara ASEAN tahun 2005, 2010, dan 2018.

Sumber: *ASEAN Reports 2018*, data diolah

Sementara itu, menurut proyeksi data dari berbagai institusi seperti *World Bank* dan OECD, yang dikompilasikan dalam *Standardized World Income Inequality Database* (SWIID), yang memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan data resmi dari ASEAN), ASEAN-5 pada tahun 2018 mencatatkan rata-rata rasio gini sebesar 0.416 atau kurang lebih 42% jika dihitung dari *market income* rumah tangga, tidak termasuk pajak dan transfer, dan sebesar 0.335 atau kurang lebih 33.5% jika dihitung dari *disposable income* rumah tangga yang sudah termasuk pajak dan transfer. Terjadi penurunan dalam kurun waktu dua puluh tahun dibandingkan dengan data resmi dari ASEAN, meskipun masih tergolong tinggi dalam ukuran *market income* karena angkanya masih berada di atas kisaran empat puluh.

Beralih ke dalam segi perekonomian dan kebijakan yang diterapkan sendiri, kondisi finansial ASEAN-5 tergolong masih rawan terhadap fluktuasi ekonomi (Ghosh, 2020). Meskipun masih terbatasnya jaringan kelima negara tersebut dengan roda perekonomian yang lebih luas memungkinkan untuk mencegah efek *spillover* dan mengurangi kemungkinan mengalami krisis (Tng & Kwek, 2015), ASEAN-5 dikritik karena cenderung tidak mempunyai kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terburuk menyongsong luasnya dunia perekonomian, serta tidak mempunyai *footing* yang baik dalam menghadapi masalah-masalah finansial yang kerap terjadi di negara masing-masing (Atmadja, 2005; Sulaeman & Lisna, 2016).

Sementara dari segi kebijakan moneter, tiap negara di ASEAN-5 secara keseluruhan mempunyai target dan metode penerapan kebijakan moneter yang berbeda-beda, dengan dua hasil yang berbeda. Kebijakan moneter di kelima negara ini dinilai mampu memprediksi pergerakan suku bunga dengan baik, serta mampu bereaksi cepat terhadap ekspektasi dan stabilitas fluktuasi dalam inflasi dan output (Ramayandi, 2007, 2009). Namun sebagian besar masih menggunakan kebijakan diskresioner di mana segala kebijakan ekonomi cenderung didasarkan kepada penilaian secara *ad hoc* (lebih menysasar kepada tujuan akhir suatu kasus tanpa pengaplikasian untuk kasus-kasus lainnya secara umum) sehingga berisiko mengurangi kemungkinan kebijakan tersebut mendorong kesejahteraan masyarakat. Kurangnya koordinasi pembuatan kebijakan yang memadai dan layak menjadi komitmen bagi kelima negara tersebut (meskipun sulit dilakukan), dinilai membuat kebijakannya menjadi kurang efisien (Ramayandi, 2009). Performa kebijakan moneter sendiri dalam menekan inflasi di berbagai negara di ASEAN-5 mempunyai hasil yang beragam pula. Malaysia dan Filipina mencatatkan tingkat inflasi yang cukup stabil dengan angka yang tidak tinggi. Indonesia masih mencatatkan angka yang fluktuatif dan cukup tinggi selama satu dekade pasca krisis, tetapi menjadi lebih teratur dan angkanya sedikit lebih kecil pada dekade berikutnya. Sementara itu, Thailand, dan terutama Singapura, berada pada angka yang cukup kecil dan berpotensi menyentuh angka minus (deflasi).

Kesenjangan pendapatan masih menjadi isu umum terutama dalam negara-negara besar seperti ASEAN-5 yang meskipun menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat serta mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak untuk menjadi SDM potensial, justru malah menunjukkan adanya pengaruh yang menghasilkan tingkat kesenjangan yang tinggi. Hal ini menunjukkan poin bahwa meskipun penerapan berbagai kebijakan seperti kebijakan moneter, meskipun dapat menyasar kepada pertumbuhan ekonomi yang efisien, pada akhirnya menimbulkan volatilitas yang justru mencegah distribusi pendapatan yang baik (Ghosh, 2020).

Latar belakang yang mendasari pemilihan tahun 1999 – 2018 dikarenakan tahun 1999 merupakan suatu masa di mana negara-negara Asia Tenggara (dan juga Asia Timur) melakukan pemulihan setelah terdampak oleh krisis yang cukup fatal pada tahun 1997-98. Kurun waktu ini juga dirasa tepat karena dapat meneliti perubahan yang terjadi pada negara anggota ASEAN-5 secara jangka panjang. Sementara itu, di sisi lain, krisis finansial Asia bukanlah satu-satunya krisis yang dihadapi pada periode ini, karena nantinya kelima negara tersebut juga akan menghadapi krisis ekonomi global pada tahun 2008, sehingga jangka waktu dua puluh tahun penelitian ini menjadi durasi masing-masing sepuluh tahun yang dilalui oleh ASEAN-5 pasca terjadinya setiap krisis, meskipun penelitian akan dilakukan secara keseluruhan dua puluh tahun tanpa terbagi dalam dua periode. Cara kelima negara tersebut beradaptasi pasca krisis dan menghadapi krisis lainnya meskipun tidak terlalu fatal, menjadi signifikan dalam mempengaruhi perekonomian negara-negara tersebut.

Kesenjangan pendapatan merupakan subjek yang cukup krusial untuk ditangani dalam dunia perekonomian karena hal ini berpengaruh secara global dan dapat menyerang negara dengan kondisi apapun, mulai dari negara berkembang hingga negara yang bisa dikatakan adikuasa seperti Amerika Serikat. Dampaknya pun tidak hanya berpengaruh untuk dimensi ekonomi, tetapi juga dapat meluas dalam tingkat sosial (dan masalah sosial banyak ditemui di daerah dengan kesenjangan yang tinggi), politik, bahkan juga kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masalah kesehatan, baik yang

jasmani maupun rohani seperti gangguan mental atau kejiwaan, merupakan sesuatu yang berkorelasi dengan adanya kesenjangan pendapatan di suatu wilayah tempat masalah tersebut ditemui (Pickett & Wilkinson, 2015).

Melalui penelitian dan pembelajaran yang matang terkait konsekuensi terjadinya kesenjangan pendapatan melalui penerapan kebijakan moneter tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa kestabilan uang melalui kebijakan moneter yang baik, secara lanjut akan berefek pula pada pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, *benefit* dari pertumbuhan ekonomi tidak selalu bisa dinikmati secara kolektif apabila distribusinya tidak terjadi secara tepat, sehingga hanya segelintir orang yang bisa memperoleh kesejahteraan sesungguhnya, dan dalam jangka panjang, tidak mampu mengubah status seseorang menjadi lebih baik karena tingkat kekayaan satu dengan yang lainnya juga timpang. Hal ini dapat menjadi catatan khusus atau referensi bagi para perencana kebijakan dalam memperhitungkan strategi yang tepat terkait penerapan kebijakan moneter, dikarenakan terdapat berbagai efek dan juga kemungkinan-kemungkinan hal yang tidak diinginkan terjadi dalam jangka panjang sebagai hasil dari transmisi kebijakan yang outputnya tidak sempurna. Perencana kebijakan di sini pun terutama adalah bank sentral masing-masing negara yang telah memperhitungkan semua perencanaan dari kebijakan moneter di Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina selama ini.

Berdasarkan dari bukti-bukti yang telah ditemukan pada penjelasan sebelumnya, muncul tujuan untuk menemukan bukti apakah kebijakan moneter mempunyai pengaruh terhadap kesenjangan pendapatan, melalui skripsi ini yang berjudul “**Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kesenjangan Pendapatan di ASEAN-5 Periode 1999-2018**”.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian spesifik mengenai pengaruh penerapan kebijakan moneter terhadap kesenjangan pendapatan sudah banyak ditemui di berbagai negara, misalnya di negara-

negara Asia Timur, terutama di Jepang, ketika negara mereka menerapkan kebijakan moneter dengan esensi *Quantitative Qualitative Easing* setelah Krisis tahun 2008 (Feldkircher & Kakamu, 2021; Inui *et al.*, 2020; Israel & Latsos, 2019; Saiki & Frost, 2014, 2020). Setidaknya satu penelitian sejenis telah ditemukan pula di negara tetangga Jepang seperti China (Sánchez-Fung, 2017) dan Korea Selatan (Park, 2021). Contoh negara maju lainnya yang meneliti isu ini adalah Amerika Serikat oleh Coibion (2017) dan Siami-Namini (2020), di mana beliau meneliti mengenai kesenjangan pendapatan di 50 negara bagian Amerika Serikat (Siami-Namini *et al.*, 2020). Sementara itu, secara *cross-country*, penelitian yang telah dilakukan, contohnya pada 10 negara di Benua Eropa (Samarina & Nguyen, 2019), 32 negara maju dan *emerging market* (Furceri *et al.*, 2018), dan juga 76 negara dengan berbagai latar belakang berbeda (Ghossoub & Reed, 2017).

Namun, penelitian yang sejenis masih belum ditemukan di ASEAN-5. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membahas kedua variabel ini secara terpisah; sebagian membahas pengaruh terhadap kesenjangan pendapatan di ASEAN ataupun ASEAN-5 sebagai resiko faktor eksternal seperti latar belakang pekerjaan atau pendidikan, serta pengembangan sektor finansial ataupun volatilitas pertumbuhan ekonomi (namun tidak spesifik sebagai transmisi dari kebijakan moneter) (Egawa, 2013; Ghosh, 2020; Lisani *et al.*, 2020; Raeskyesa, 2020) sementara sebagian lainnya membahas pengaruh kebijakan moneter di lokasi yang sama, umumnya membahas pengaruhnya terhadap pengembangan finansial suatu negara dan kesejahteraan masyarakat (Atmadja, 2005; Poon, 2010; Ramayandi, 2007, 2009; Sulaeman & Lisna, 2016; Tng & Kwek, 2015), namun belum ada yang secara spesifik membahas hubungan antara keduanya secara langsung. Penelitian di kelima negara secara terpisah yang membahas pengaruh kebijakan moneter terhadap kesenjangan pendapatan secara spesifik juga masih sangat terbatas. Satu-satunya negara yang telah melakukannya adalah Indonesia, di mana ditemukan penelitian dalam tingkat provinsi (namun dalam keadaan beberapa provinsi tidak diikutsertakan) (Kurniadi & Pasaribu, 2017), dan dalam tingkat nasional dengan fokus transmisi tersendiri, yaitu melalui *income composition* channel (Putri & Wasiaturrahma, 2019).

Selebihnya belum ditemukan penelitian untuk keempat negara lainnya, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kedua aspek ini cenderung diteliti secara terpisah oleh sebagian besar negara-negara ini. Fakta itulah yang melatarbelakangi orientasi penelitian ini untuk menciptakan perbedaan baru yang diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mengenai pengaruh kebijakan moneter terhadap kesenjangan pendapatan dan tidak sebatas hanya berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya yang masih terhitung sedikit.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini, berdasarkan penjabaran informasi dari subbab sebelumnya, adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan moneter yang dilakukan di ASEAN-5 ini terhadap kesenjangan pendapatan.

1.4 Metode Penelitian

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah Panel *Vector Error Correction Model* atau Panel VECM. Teknik ini dilakukan jika semua variabel yang digunakan (Rasio gini, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan GDP, dan *Broad Money*) terbukti terkointegrasi. Estimasi dimulai dengan melakukan uji stasioneritas menggunakan uji unit akar. Kemudian, dilanjutkan dengan pemilihan lag maksimal sesuai kriteria dan melakukan uji kointegrasi. Jika hasilnya terkointegrasi, model yang diambil adalah PVECM. Selanjutnya, dilakukan uji stabilitas model dengan menggunakan nilai *root of characteristic polynomial*. Model kemudian diuji kausalitas menggunakan *Granger Causality*, menentukan IRF dan *variance decomposition*. Terakhir, melakukan uji diagnostik dan juga pengujian *Impulse Response Factor* serta *Variance Decomposition*.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter berpengaruh secara langsung terhadap kesenjangan pendapatan, dan sebagian besar variabel yang diestimasi

mempunyai pengaruh yang lebih sugestif untuk arahan kebijakan moneter ekspansif, di mana fokusnya adalah untuk menekan tingkat suku bunga. Hanya saja, estimasinya tidak signifikan pada jangka pendek, dan efeknya baru dapat dirasakan pada jangka panjang, di mana signifikansi baru dapat terlihat pada waktu tersebut. Selain itu, meskipun kebijakan moneter yang dianjurkan lebih mengarah kepada ekspansif berdasarkan hasil, tetapi signifikansi dari inflasi masih bernilai positif, yang artinya, semakin tinggi inflasi, semakin tinggi kesenjangan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa sekalipun fokus utama kebijakan ini salah satunya adalah dengan mendorong inflasi, namun pertumbuhannya tetap harus diawasi dengan cermat seraya segenap pihak terus mendorong pemerataan kesejahteraan, guna mempertahankan batasan tingkat yang baik dan mencegah kesenjangan yang lebih tinggi dapat terjadi. Ini juga bisa menjadi patokan bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan moneter kontraktif yang lebih menasar kepada penekanan inflasi, sekalipun penelitian ini masih lebih menganjurkan kebijakan moneter yang bersifat ekspansif.

Sementara itu, kesenjangan pendapatan yang terjadi dari variabel kebijakan moneter juga dapat menasar pada saluran yang bersifat tidak langsung, di mana variabel makroekonomi seperti pengangguran dan variabel finansial seperti harga aset, apabila terlalu tinggi dan membatasi cakupan masyarakat untuk bisa memperoleh fasilitas yang lebih baik, justru dapat mendorong kesenjangan pendapatan yang lebih tinggi.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi dari penelitian ini, sekaligus yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya yang sudah dilakukan sebelumnya, adalah fakta bahwa penelitian mengenai pengaruh kebijakan moneter terhadap kesenjangan pendapatan di ASEAN-5 masih tergolong sedikit, belum sebanyak penelitian negara-negara kolektif lainnya yang telah dilakukan di dunia Barat.

Kesenjangan pendapatan di negara-negara ASEAN, misalnya di Indonesia umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain di luar kebijakan moneter, misalnya penelitian yang

mempermasalahkan pembangunan yang tidak merata terutama pembangunan infrastruktur penunjang (Sukwika, 2018). Sementara itu, kebijakan moneter lebih dikaitkan dengan target yang lain, misalnya salah satunya, adalah efek penyaluran kredit (Nangarumba, 2016). Contoh lainnya misalnya kesenjangan pendapatan di Thailand yang umumnya dikaitkan dengan hal eksternal seperti tingkat pendidikan (Motonishi, 2006), sementara kebijakan moneternya cenderung hanya difokuskan untuk tujuan utamanya yaitu mengendalikan inflasi (Taguchi & Wanasilp, 2018), dan umumnya tidak untuk masalah lain yang tidak dijangkau oleh kebijakan, seperti kesenjangan pendapatan.

Penelitian ini juga bermaksud untuk mencari tahu dampak yang lebih luas atau lebih besar dari adanya kejadian ekonomi yang bersifat multinasional, atau adanya satu gejala yang tidak hanya dialami oleh satu negara saja, misalnya seperti di benua atau Zona Perdagangan. Contoh yang paling mudah misalnya Benua Eropa (Guerello, 2018). Penulis akan memutuskan untuk lebih terfokus kepada negara-negara besar dari dua subkontinen yang secara konkrit harus merasakan proses kebangkitan dari krisis, yaitu ASEAN-5 di Asia Tenggara dan tiga negara terbesar di Asia Timur, dengan tujuan supaya pencarian data lebih terfokus dan alur perekonomian dapat lebih mudah diselidiki. Penulis memanfaatkan jurnal utama terbaru dan versi sebelumnya, yang berfokus di Negara Jepang (Saiki & Frost, 2014, 2020) dan juga contoh lainnya seperti penelitian di Negara Amerika Serikat (Siarni-Namini *et al.*, 2020).

Dikarenakan penelitian ini mencoba untuk melihat pertumbuhan perekonomian ASEAN-5 melalui *flashback* kebangkitan negara-negara tersebut setelah dilanda Krisis Ekonomi di Asia Tenggara pada tahun 1997-1998, pemfokusan terhadap negara-negara yang terdampak paling fatal dapat dinilai sebagai bentuk arahan subjek yang baik untuk penelitian. Dengan itu, diharapkan penelitian ini mampu memaparkan bukti konkrit yang menunjukkan *progress* ASEAN-5 selama ini sehingga dapat menjadi parameter bagi negara lainnya dalam melihat contoh kemajuan negara yang konstan di bidang ekonomi serta bagaimana cara tersebut tercapai.

Melalui kontribusi penelitian ini untuk mengetahui dampak dari aplikasi kebijakan moneter terhadap munculnya kesenjangan pendapatan di negara-negara ASEAN-5 dalam periode waktu tertentu, diharapkan dapat mempengaruhi atau memberikan pertimbangan terhadap pihak terkait dalam merespon kebijakan yang berisiko menimbulkan kesenjangan tersebut, misalnya adalah bank sentral selaku konseptor kebijakan moneter.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan, ringkasan hasil penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk mengkaji penelitian tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, identifikasi variabel, jenis dan sumber data, serta metode analisis dan pengolahan data. Pada bab ini juga menjelaskan keterbatasan atau kelemahan penelitian berdasarkan keterbatasan teori atau konsep, model, data dan alat analisis.

BAB IV ISI

Bab ini berisi pencarian data, jawaban dari pertanyaan penelitian, serta hasil estimasi dari model model yang digunakan untuk penelitian itu sendiri.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atau konklusi penelitian dari temuan-temuan yang diperoleh selama estimasi model dan juga pencarian informasi yang berkaitan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang dilakukan pada bab sebelumnya. Dari sini juga peneliti dapat beropini mengenai sesuatu apa yang harus dilakukan/diubah/ditambahkan terkait temuan yang didapatkan selama meneliti topik skripsi ini.